

BAB V

KESIMPULAN

Komitmen Uni Eropa terhadap nilai gender equality dibuktikan dengan menjadikan gender equality sebagai prinsip Uni Eropa. Uni Eropa memasukkan gender equality sebagai fokus di setiap kebijakan yang akan diadopsi. *Gender equality* menjadi norma di Uni Eropa setelah diperkenalkan pada Perjanjian Roma pada tahun 1957 dan sampai sekarang Uni Eropa sudah mengadopsi 15 directives, seperti kesempatan yang sama dalam pekerjaan, melarang diskriminasi dalam hal sosial, standar cuti orang tua, perlindungan terhadap pekerja ibu yang hamil, pekerjaan, hak hukum, dan pengupahan. Nilai *gender equality* berkembang menjadi norma karena adanya dukungan dan telah menyatukan masyarakat Uni Eropa. Uni Eropa juga membuat perjanjian bersama negara-negara anggotanya dalam mengimplementasikan gender equality dalam menghilangkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Dukungan juga datang dari organisasi internasional dengan adanya *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* dan Uni Eropa mempunyai organisasi asosiasi perempuan terbesar yang yaitu *The European Women's Lobby (EWL)*.

Uni Eropa tidak hanya menerapkan nilai gender equality didalam negeri, tetapi juga dalam kebijakan luar negerinya. Uni Eropa membuktikan komitmennya dengan adanya fokus gender dalam *The EU Consensus on Development*, didalam Konsensus terdapat *Development Cooperation Instrument* dan yang terbaru *Agenda of Change* dan dalam kerjasama dengan negara-negara lain untuk mencapai tujuan ketiga dari *Millenium Development Goals* yang di dalamnya terdapat berbagai program yang diklasifikasikan

menjadi tiga jenis, yaitu *geographic programmes*, *thematic programmes*, dan *Pan-African programme*.

Uni Eropa di bantu dengan organisasi internasional seperti PBB, WHO, Bank Dunia, IMF dalam mencapai pembangunan di negara-negara ketiga. Di dalam konsesus pembangunan, Uni Eropa juga memasukan unsur gender. Pembangunan manusia memiliki tiga indikator yaitu angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapat per kapita. Dilihat dari *Human Development Index*, masih banyaknya negara-negara yang memiliki angka yang rendah dalam indikator tersebut. Uni Eropa mengintegrasikan *gender equality* di negara-negara berkembang karena masih banyak perempuan yang mejadi korban diskriminasi, banyak perempuan di negara-negara ketiga masih hidup di bawah kendali orang lain, mengalami diskriminasi dan masih banyak perlakuan tidak adil lainnya. Pembangunan harus dicapai dengan dilibatkannya laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi salah satu dari mereka. Uni Eropa percaya bahwa *Gender equality* dan pemberdayaan perempuan adalah hak asasi manusia dan pendorong pembangunan.

Program-program yang dibuat oleh Uni Eropa, didalamnya meliputi gender mainstreaming dan melakukan tindakan-tindakan spesifik seperti dialog politik, bantuan dana untuk pemberdayaan perempuan. Uni Eropa melakukan development assistance ke negara negara berkembang, contohnya Senegal, Kepulauan Solomon, Liberia, Sierra Leone, Nigeria dimana perempuan di negara-negara itu masih banyak menjadi korban kekerasan seksual, tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan bagi perempuan karna faktor keluarga dan budaya di negara mereka, dan kesempatan untuk duduk di parlemen masih sedikit.

Uni Eropa juga memiliki *European Consensus on Humanitarian Aid* didalamnya terdapat fokus Uni Eropa pada gender. Bantua kemanusiaan dilakukan dengan

memberikan bantuan yang menyelamatkan hidup bagi mereka yang membutuhkan, tanpa perbedaan yang merugikan. Tindakan Uni Eropa berkisar mulai dari kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, bantuan dalam krisis berkepanjangan hingga pemulihan awal dinegara-negara yang sedang mengalami krisis, seperti perang, bencana alam yang parah, dan krisis kelaparan. bantuan kemanusiaan Uni Eropa seperti mengatasi penderitaan manusia dengan perhatian khusus pada kelompok orang yang paling rentan, dengan prinsip *humanity*, *neutrality*, *impartiality*, dan *independence*.

Uni Eropa memasukan prinsip gender equality karna bantuan kemanusiaan tentang menjangkau semua segmen penduduk yang terkena dampak secara efektif. Integrasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam aksi kemanusiaan sangat penting untuk memastikan sistem kemanusiaan berbasis hak dan efektif untuk semua wanita, pria, anak laki-laki dan anak perempuan yang terkena dampak bencana dan konflik. Krisis di suatu negara membawa dampak yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, maka dari itu bantuan kemanusiaan harus mencakup semua kebutuhan, terutama bagi kelompok yang paling rentan.

Banyaknya yang menjadi korban kekerasan seksual berbasis gender baik laki-laki dan perempuan juga harus di perhatikan. Upaya kemanusiaan harus mengakui fakta bahwa perempuan dan anak perempuan seperti laki-laki dan anak laki-laki, harus banyak berkontribusi dalam mempersiapkan, dan menanggapi krisis. Perempuan harus dimasukkan dalam pengambilan keputusan tentang bentuk-bentuk bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan. Kekerasan seksual berbasis gender tetap menjadi isu yang tidak dilaporkan dan kurang ditangani dalam masalah krisis kemanusiaan. Aktor kemanusiaan harus memberikan perlindungan yang sesuai dengan strategi dan keadaan

disekitar wilayah konflik karena kekerasan seksual berbasis gender adalah masalah yang sangat rumit. Korban dan orang yang selamat bisa bervariasi.

Perempuan dan anak juga memiliki kapasitas khusus untuk berkontribusi pada pemulihan bencana atau perdamaian, untuk membangun ketahanan dan untuk mendorong pengurangan risiko bencana. Bantuan dan dukungan dapat diberikan dengan cara yang menantang prasangka tentang peran dan kemampuan perempuan, misalnya dengan meningkatkan akses perempuan ke mata pencaharian - termasuk yang menantang asumsi pembagian kerja berdasarkan gender; meningkatkan peran mereka dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan masyarakat.

Langkah-langkah khusus harus diambil untuk menghilangkan hambatan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan yang berusaha mengakses fasilitas dan layanan dan yang ingin berpartisipasi dalam respon seperti mobilitas terbatas, pembatasan budaya atau kurangnya waktu. Maka dari itu pendonor penting untuk memilih strategi yang efektif. Operasi kemanusiaan yang didukung oleh Komisi harus mempertimbangkan setiap risiko kekerasan berbasis gender dan, jika perlu, memberikan perlindungan yang sesuai dengan strategi dan keadaan disekitar wilayah konflik.